

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Menurut Anton, (2010) *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Wahida 2015). Dengan demikian jika pihak *principal* dan *agent* memilih hubungan kepengurusan (*stewardship*), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak *principal* memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh pemerintah

daerah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan guna untuk pengambilan keputusan. Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi merupakan alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Secara prinsip akuntansi adalah alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mahmudi (2011) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbrda jauh.

- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasarkan kualitas laporan keuangan yang rendah akan

mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan (Rosdiani, 2011). Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014). Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu menimbulkan resiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi mencakup berbagai faktor teknis dan non teknis, kepribadian dan tingkah laku, *soft skill* dan *hard skill*, kemudian banyak dipergunakan sebagai aspek yang dinilai banyak perusahaan untuk merekrut karyawan ke dalam organisasi. Menurut Sedarmayanti (2013) “*any personal trait characteristic or skill which can be shown to be directly linked to effective or outstanding job performance*”, yang artinya bakat, sifat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja efektif dan baik sekali. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.

Menurut Simanjuntak dalam buku Tunggal (2013), Sumber daya manusia definisinya mengandung dua pengertian yaitu, usaha kerja/jasa yang dapat diberikan dalam produksi. Hal ini mencerminkan “kualitas” usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Hal ini mencerminkan “kuantitas” yaitu jumlah manusia yang bekerja pada suatu perusahaan. Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif dan akan menjadi lebih sulit untuk ditiru sehingga sumber-sumber keberhasilan kompetitif tradisional seperti teknologi proses produksi, protektif pasar, akses terhadap sumber keuangan dan skala ekonomi seharusnya menjadi lebih berdaya guna.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2010:40). Kompetensi SDM yang sangat penting bagi perusahaan adalah SDM yang memiliki keahlian di bidangnya, menguasai sistem yang ada, motivasi dan berprestasi tinggi, kreatif, inovatif dan berkepribadian dewasa mental dengan kecerdasan emosi baik.

Bidang akuntansi pada perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan. Posisi sebagai akuntan perusahaan dibagi menjadi beberapa posisi yang lebih spesifik, salah satunya akuntan keuangan. Akuntan keuangan adalah yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan (Rudianto, 2012).

Menurut Rudianto (2012) beberapa hal penting yang tercantum dalam profesi akuntan adalah sebagai berikut:

1. Setiap akuntan harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi aturan dan etika profesi serta hukum Negara dimana ia melaksanakan pekerjaannya.
2. Setiap akuntan harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.
 - Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretense.
 - Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.
3. Setiap akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai standar teknis dan professional yang relevan.
4. Setiap akuntan harus meningkatkan kecakapan profesionalnya agar mampu memberikan manfaat optimal dalam melaksanakan tugasnya.
5. Setiap akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya.
6. Setiap akuntan harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu

organisasi dalam mencapai tujuan tertentu (PP No. 60 Tahun 2008). Sedangkan Mulyadi (2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengendalian internal control menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal di rancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Komponen pengendalian Internal menurut COSO :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian

risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

4. Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing – masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dan kerugian.

Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuatan-pembuatan standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan nama entitas merupakan subjeknya. Tujuan-tujuan pengendalian internal dalam versi COSO tahun 2013 ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi perusahaan atau entitas secara keseluruhan.

2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi (Handayani, 2007).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sementara itu, dalam PP No.71 Tahun 2010 pada lampiran I mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/ walikota/ bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap OPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran OPD
2. Laporan Operasional OPD
3. Laporan Perubahan Ekuitas OPD
4. Neraca OPD
5. Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh PPK-OPD. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset Tetap, Prosedur Akuntansi Selain Kas

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian – penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

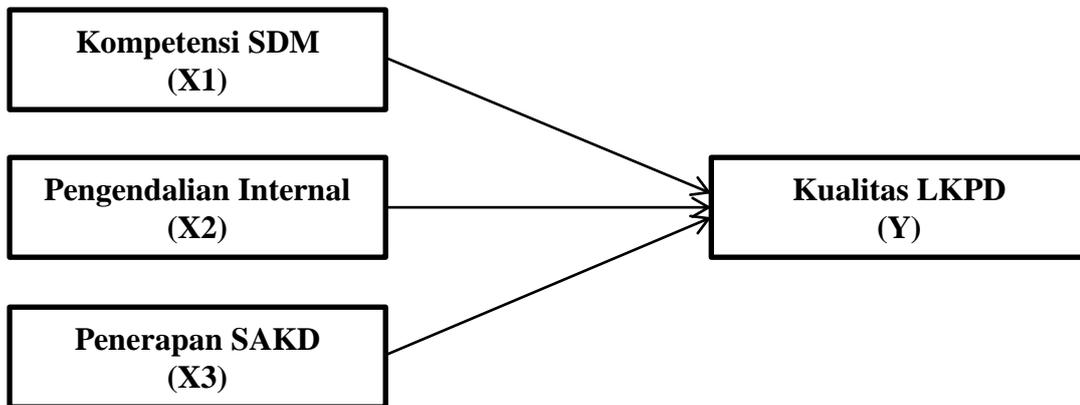
Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Celviana (2010)	Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi	Independen: Sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi Dependen: Keterandalan, dan Ketepatan Waktu pelaporan keuangan pemerintah	Hasil penelitian dalam model pertama dengan path analysis menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan antara sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Akuntansi, Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.
Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

	Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Informasi, Pengendalian Intern Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Besarnya pengaruh keempat variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 45,3% . Hasil penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Anggraeni (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD (Studi Persepsian SKPD Se Kabupaten Agam)	Independen: Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam. Sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam.
Suwita (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)	Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan perhitungan korelasi <i>pearsson product moment</i> penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

<p>Hasyim (2017)</p>	<p>Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru)</p>	<p>Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia.</p> <p>Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Intervening: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.</p>	<p>Hasil penelitian ini secara empiris menyimpulkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, (2) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.</p>
<p>Triyanti (2018)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)</p>	<p>Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ada dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami kompeten dalam bidang akuntansi. Dalam Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut sumber daya manusia yang akan menjalankan system atau yang menghasilkan informasi tersebut, sehingga dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya

manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Menurut Putri (2015) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian, kompensasi dan persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan sistem pengendalian internal yang efektif. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2010). Peneliti Triyanti (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Didukung Penelitian Celviana (2013) yang menyimpulkan bahwa SDM bidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung system pengendalian yang memadai. Pengertian system

pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (*eksekutif*) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. (Mahmudi, 2016).

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisien dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Susanto 2013). Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien. Peneliti Triyanti (2018) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₂: Sistem pegendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.8.3 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Disisi lain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu

kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah terjadinya kerugian negara (Hasyim, 2017). Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolongan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu (Ratifah & Ridwan, 2012). Selain itu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Wati *et al.*, 2014; Yuliani, Nadirsyah, & Bakar, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Suwita (2015) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₃: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.